

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DILUAR NIKAH YANG
MERUPAKAN AHLI WARIS TUNGGAL DARI PESERTA BPJS
KETENAGAKERJAAN MENURUT PP NO.44 TAHUN 2015 DAN KUH PERDATA**

ABSTRAK/ABSTRACT

VERINA TANIA RUANDI

213309030001

Anak adalah masa depan dalam keluarga dan pewaris keluarga sekalipun anak tersebut adalah anak luar nikah karena anak yang lahir patut dilindungi haknya dalam kedudukan pewarisan. Bagaimana jika pewaris meninggalkan Anak luar nikah yang akan menjadi ahli waris tunggal BPJS Ketenagakerjaan yang akan memiliki banyak gangguan dari pihak lainnya jika anak luar nikah tidak memiliki kedudukan. maka tujuan dalam penelitian ini agar anak diluar nikah bisa mendapatkan hak dan kedudukan dalam pewarisan. Metode penelitian menggunakan hukum normatif dan hukum empiris(sosiologis). Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Agar anak luar nikah mendapatkan pengakuan dari ayahnya sesuai dengan Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 jika dapat dibuktikan dengan tes DNA maka anak tersebut adalah anaknya sehingga anak tersebut mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan akta kelahiran dengan dicantumkan nama ayah dan ibu sehingga anak luar nikah berhak atas warisan BPJS Ketenagakerjaan.

Kata kunci : Anak luar nikah, BPJS Ketenagakerjaan, Putusan MK , Hukum Positif Indonesia

The child is the future in the family and the heir to the family even if the child is an illegitimate child because the child born should have his rights protected in the position of inheritance. What if the heir leaves an illegitimate child who will become the sole heir of Employment BPJS who will have a lot of interference from other parties if the illegitimate child has no position. So the purpose of this research is for illegitimate children to get rights and positions in inheritance. The research method uses normative laws and empirical (sociological) laws. Article 43 paragraph 1 of the Marriage Law states that a child born out of wedlock only has a civil relationship with his mother and his mother's family. In order for children out of wedlock to receive recognition from their father according to the Constitutional Court Decision No.46/PUU-VIII/2010 if it can be proven by a DNA test then the child is his child so that the child has the opportunity to obtain a birth certificate with father and mother name so that children out of wedlock have the right to inherit BPJS Employment .

Keywords: Children out of wedlock, Employment BPJS, Constitutional Court Decision, Indonesian Positive Law